



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/147/Kept./403.013/2023  
TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
UNTUK SETIAP KRITERIA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Setiap Kriteria dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6477);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6264);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

- Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 28);
  23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Setiap Kriteria dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/99/Kept/403.013/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Kriteria dan Kelas Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
The stamp is circular with a star on the left and the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN' around the perimeter. In the center, it says 'SETDA'. A blue ink signature is written over the stamp.  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/147/Kept./403.013/2023  
 TANGGAL : 31 MEI 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 UNTUK SETIAP KRITERIA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

I. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

NOMOR URUT	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA (Rp....,00)	
		CALON PNS DAN PNS	PPPK
1	2	3	4
1	15	7,000,000	850,000
2	14	4,250,000	800,000
3	13	3,650,000	750,000
4	12	3,000,000	700,000
5	11	2,350,000	650,000
6	10	2,000,000	600,000
7	9	1,800,000	550,000
8	8	1,450,000	500,000
9	7	1,250,000	450,000
10	6	1,150,000	400,000
11	5	950,000	350,000
12	4	650,000	325,000
13	3	550,000	300,000
14	2	450,000	275,000
15	1	350,000	250,000

II. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NOMOR URUT	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA (Rp....,00)	
		CALON PNS DAN PNS	PPPK
1	2	3	4
1	15	5,100,000	800,000
2	14	2,850,000	750,000
3	13	2,550,000	700,000
4	12	2,000,000	650,000
5	11	1,550,000	600,000
6	10	1,350,000	550,000
7	9	1,200,000	500,000
8	8	950,000	450,000
9	7	850,000	400,000
10	6	750,000	350,000
11	5	650,000	300,000
12	4	575,000	275,000
13	3	500,000	250,000
14	2	525,000	225,000
15	1	550,000	200,000

### III. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA

#### A. CALON PNS DAN PNS

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp.....,00)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JPT															3,900,000
	JA											1,500,000	1,600,000			
	JP/JF PENYETARAAN									900,000						
	JFT											400,000	400,000			
	PELAKSANA	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000							
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JPT															3,900,000
	JA											1,500,000	1,600,000			
	JP/JF PENYETARAAN									900,000						
	JFT							200,000	300,000	300,000		400,000	400,000			
	PELAKSANA	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000							
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT							100,000	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT											300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp.....,00)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JA															2,200,000	
	JP/JF PENYETARAAN									800,000							
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000									
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	JPT															3,400,000	
	JA											1,100,000	1,200,000				
	JP/JF PENYETARAAN									800,000							
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000		300,000	300,000				
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000									
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JPT															3,400,000	
	JA											1,100,000	1,200,000				
	JP/JF PENYETARAAN									800,000							
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000			300,000				
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000									
DINAS KESEHATAN	JPT															3,400,000	
	JA											1,100,000	1,200,000				
	JP/JF PENYETARAAN								400,000	800,000							
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000									



PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp....,00)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000		300,000				
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT												300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT								200,000	200,000		300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000		300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp.....,00)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN								400,000	800,000						
	JFT								200,000	200,000		300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000			300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT					100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp....,00)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS PERHUBUNGAN	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT					100,000	100,000	200,000	200,000							
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN								400,000	800,000						
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000		300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT								200,000	200,000		300,000				
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT						100,000	200,000	200,000	200,000		300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp....,00)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS PPKB DAN PPPA	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT											300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
DINAS SOSIAL	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT											300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN								400,000	800,000						
	JFT					100,000	100,000		200,000	200,000	300,000	300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							
DINAS TENAGA KERJA	JPT															3,400,000
	JA											1,100,000	1,200,000			
	JP/JF PENYETARAAN									800,000						
	JFT						100,000	200,000	200,000		300,000	300,000	300,000			
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000							

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp.....,00)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
INSPEKTORAT	JPT															6,900,000	
	JA											2,300,000	2,500,000				
	JFT												1,700,000				
	JFTInsp								1,100,000	1,300,000	1,450,000	1,650,000	1,900,000				
	JP/JF PENYETARAAN									1,100,000							
	PELAKSANA	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000								
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	JPT															3,400,000	
	JA											1,100,000	1,200,000				
	JP/JF PENYETARAAN									800,000							
	JFT					100,000	100,000	200,000	200,000	200,000		300,000					
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000									
SEKRETARIAT DAERAH, SELAIN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)	JPT														3,000,000	4,400,000	8,800,000
	JA												3,000,000				
	JP/JF PENYETARAAN									1,100,000							
	JFT						400,000	500,000	500,000	550,000		600,000	650,000				
	PELAKSANA	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000									
SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)	JA												3,850,000				
	JP/JF PENYETARAAN									1,600,000							
	JFT								1,400,000		1,650,000		1,950,000				
	PELAKSANA	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	600,000									

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp.....,00)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
SEKRETARIAT DPRD	JPT															3,400,000	
	JA											1,100,000					
	JP/JF PENYETARAAN									800,000							
	JFT								200,000	200,000		300,000	300,000				
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000								
KECAMATAN	JA											1,100,000	2,500,000				
	JP									1,000,000							
	JP KEC								500,000								
	JP KEL								450,000								
	JFT							100,000									
	PELAKSANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000									
PUSKESMAS	JFT					700,000	750,000	800,000	850,000	900,000	950,000	1,000,000	1,100,000			1,500,000	
	JP								850,000								
	PELAKSANA	500,000	550,000	600,000	650,000	700,000	750,000										

b. PPPK

PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PER KELAS JABATAN (Rp.....,00)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PUSKESMAS	JFT					350,000	375,000	400,000	425,000	450,000	475,000	500,000	550,000			750,000
	JP								425,000							
	PELAKSANA	250,000	275,000	300,000	325,000	350,000	375,000									

IV. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI (Rp...,00)
SEKRETARIAT DAERAH	JABATAN PIMPINAN TINGGI	15	8.800.000

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA  
MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004